



**TRANSFORMASI
EKONOMI INDONESIA
MENUJU NEGARA MAJU
DAN BERDAYA SAING**

P E M I K I R A N

100

EKONOM

I N D O N E S I A

INDEF

**TRANSFORMASI
EKONOMI INDONESIA
MENUJU NEGARA MAJU
DAN BERDAYA SAING**

PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA

INDEF

**Transformasi Ekonomi Indonesia
Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing**
Pemikiran 100 Ekonom Indonesia

Editor:
Berly Martawardaya
Esther Sri Astuti

Penyelaras:
Malik Ruslan

Desain Cover dan Tata Letak:
Sarwo Edhie

ISBN: 978-623-6999-05-9

INDEF
Jl, Batu Merah No. 45 Pejaten Timur, Jakarta 12510
Telp. 021 7901001
Email: indef@indef.or.id
www.indef.or.id

Sekapur Sirih

Buku bunga rangkai menduduki tempat tersendiri dalam spektrum katagori buku. Dari segi jumlah penulis dan kontribusi tiap penulis pada buku, satu titik ujung spektrum adalah buku yang ditulis oleh satu orang dan menjadi kanvas dari curahan pemikiran dan pengalaman seseorang yang dalam dan luas. Buku dengan satu orang penulis seperti *The Wealth of Nation (1776)* karya Adam Smith atau *Membangun Koperasi, Koperasi Membangun* karya Bung Hatta, membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses penulisan yang merupakan *magnum opus* serta kristalisasi pemikiran dan pengalaman penulisnya atas permasalahan besar jangka panjang sehingga buku tipe ini adalah terus menjadi rujukan sekian dekade, bahkan abad, setelah terbit. Ujung spektrum lain penerbitan adalah artikel opini pendek yang membahas permasalahan aktual dimana sang penulis akan merasa puas apabila pemetaan masalah dan solusinya diadopsi oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Buku bunga rampai memungkinkan pemikiran opini dari banyak penulis dengan keahlian dan pengalaman masing-masing yang dirangkai dengan benang merah yang disiapkan sejak awal sehingga menjadi mozaik yang layak dirujuk dan dibaca lagi untuk waktu yang (relatif) panjang.

Buku ini adalah ketiga kali-nya INDEF mengumpulkan pemikiran para ekonom dengan judul “Pemikiran 100 Ekonom Indonesia”. Namun hanya kata pertama yang akurat dan bisa dimaknai secara umum dan tanpa perluasan makna. Dari segi jumlah terdapat 107 artikel yang ditulis 113 ekonom (ada beberapa artikel yang *joint authorship*). Para penulis buku ini adalah ekonom dalam arti awal *oikos nomos* yang dalam bahasa Yunani berarti mengatur rumah tangga. Mengurusi rumah tangga negara, apalagi yang sedang menghadapi pandemi, membutuhkan bukan hanya pemikiran dari para ahli ekonomi tapi juga para ahli kesehatan, pertanian, lingkungan, sosial, budaya dan juga teknik/teknologi. Latar belakang para penulis juga berasal dari berbagai profesi: akademisi, *policy maker*, LSM, profesional, pengusaha dll. Kata Indonesia pada judul buku perlu diartikan sebagai ekonom warga negara Indonesia karena editor secara khusus mengajak beberapa ekonom Indonesia yang sedang berdomisili di negara lain untuk menyampaikan perspektifnya yang lebih berjarak dari hingar bingar dalam Indonesia.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima hal yang menjadi

prioritas dalam lima tahun pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin yaitu 1) Membangun SDM pekerja keras, terampil, dan menguasai teknologi; 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur; 3) Penyederhanaan regulasi; 4) Memangkas birokrasi dan prosedur; 5) Transformasi ekonomi dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

Penyusunan buku ini dimulai pada awal tahun 2020 dengan asumsi bahwa pemerintah Jokowi- Ma'ruf Amin dapat memfokuskan kebijakan dan langkahnya untuk mewujudkan lima prioritas diatas khususnya prioritas kelima sebagai. Periode pemerintah 2019-2024 sangat penting karena mengalami bonus demografi dan mendapat mandate politik yang cukup kuat di pilpres sehingga bisa membereskan berbagai PR ekonomi Indonesia. Periode ini adalah tonggak penting dalam meraih Indonesia emas yang mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya pada 2045. Sehingga tema besar buku "Pemikiran 100 Ekonom Indonesia" ini adalah "**Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Negara Maju dan Berdaya Saing**".

Mengganasnya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah dan masyarakat sipil harus mengalihkan fokus dan energi dari prioritas awal. Ekspektasi meningkatnya investasi dan pertumbuhan tinggi paska pemilu 2019 sesuai pola umum siklus lima tahunan paska reformasi menjadi redup. Pola penyebaran Covid-19 yang menyukai kerumunan dan pergerakan orang menyebabkan langkah penanganan pandemi memiliki dampak ekonomi cukup luas sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada pada minus 2,07%.

Masa pandemi yang penuh tantangan ini memerlukan kolaborasi antar aktor untuk menghasilkan analisa yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang ampuh memulihkan serta memperkuat ekonomi Indonesia. Editor teringat sekaligus berharap pada *Sadli's Law on Indonesian Economic Policy* dimana Prof M. Sadli sebagai ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Tambang dan Energi menyatakan bahwa "*Good times give rise to lazy populist economic policies while crisis times produce good policies*".

Buku ini adalah upaya mengumpulkan *good policies* dan *good solutions* yang terserak di kepala para akademis, pemerintah, profesional di swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha Indonesia. Beberapa diantara artikel di buku ini sudah pernah disampaikan idenya di artikel koran, ruang seminar atau jurnal ilmiah, tapi dengan dikumpulkan dalam satu buku maka editor berharap bahwa pemikiran dan solusi lebih mudah di akses dan saling mengisi sehingga lebih panjang masa relevansinya.

Buku ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan besar ekonomi Indonesia sehingga dibagi menjadi tujuh kluster yaitu:

(1) Transformasi Struktural; (2) SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Jaminan Sosial, (3) Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan Perumahan; (4) *Public Finance*, Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi; (5) Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing; (6) Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa; (7) Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup

Kluster pertama dengan tema “Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia” ditempatkan didepan untuk menampilkan berbagai analisa jangka panjang dan lintas sektor (*longee duree*). Perencanaan kebijakan publik dan ekonomi membutuhkan target jangka panjang (*indicative planning*) sehingga berbagai kegiatan dan program mempunyai efek akumulasi dan tidak zigzag terlalu jauh. Masuknya Indonesia ke negara berpendapatan menengah di tahun 2020 menjadi fokus beberapa artikel pada kluster ini dengan merekomendasikan langkah-langkah akselerasi pembangunan ke 100 tahun Indonesia di tahun 2045 yang sejahtera sebelum tua.

Kluster kedua dengan tema “SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Jaminan Sosial” adalah prioritas pertama dari pemerintah Jokowi - Ma’ruf Amin. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 telah menginspirasi beberapa ekonom untuk membedah pemikirannya dalam kluster kedua buku ini. Kesejahteraan ekonomi Indonesia bisa ditingkatkan dengan kenaikan kualitas sumber daya manusia. Mengoptimalkan bonus demografi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan menjadi bahasan banyak artikel di kluster ini. Untuk mengimbangi bias Jawa, secara khusus editor mengundang ekonom dari Papua untuk menyampaikan kondisi dan analisa dari lapangan. Kluster kedua juga banyak terkait dengan kondisi pandemi Covid sehingga menjadi bagian analisa beberapa artikel, editor juga mengajak ahli kesehatan untuk berbagi keahlian dan pandangan

Tema kluster ketiga “Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan Perumahan” adalah prioritas pertama Presiden Jokowi-JK periode 2014-2019 dan tetap masuk dalam lima prioritas pemerintah periode ini. Sebagai negara dengan area luas berbentuk kepulauan maka tidak mudah, tapi sangat penting, untuk menghubungkan, mensupply energi dan menyediakan rumah bagi 271,3 juta penduduk Indonesia secara merata di berbagai penjuru. Ketika cadangan energi fosil semakin menipis, maka semakin meningkat juga urgensi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan.

Kluster ke-empat dengan tema “*Public Finance*, Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi” adalah salah satu kluster dengan artikel terbanyak. Pada masa pendemi ketika konsumsi dan investasi serta ekspor turun pertumbuhannya, maka optimalisasi peran pemerintah

menjadi sangat penting. Belanja pemerintah, pajak, dan dana desa banyak menjadi topik artikel di kluster ini. Perlu pengelolaan anggaran pemerintah yang optimal, tepat sasaran dan cepat dicarikan untuk kegiatan kegiatan produktif, dan bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara baik pajak dan non pajak untuk mendukung transformasi penguatan ekonomi Indonesia. Kluster ini juga membedah bagaimana otonomi daerah, birokrasi dan institusi dapat berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berdaya saing

Kluster kelima menyoroti “Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing” yang walaupun banyak tiap selama pandemi tapi perlu disiapkan langkah-langkah untuk bangkit ketika sudah banyak masyarakat yang mendapat vaksinasi. Struktur ekonomi Indonesia dengan banyak sekali UMKM dan sedikit perusahaan medium dan besar tidaklah optimal. Pola di Asia Timur dan Asia Tenggara adalah industrialisasi berorientasi export (*export oriented manufactur*) yang bernilai tambah tinggi menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan negara perlu di terapkan, *at least partially*, di Indonesia. Peran strategis BUMN yang bukan hanya organisasi yang mencari profit tetapi juga sebagai agen yang membantu pemerintah menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pengelolaan kekayaan negara menjadikan peningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BUMN sangat penting.

Kluster ke-enam dengan tema “Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa” dimana sektor keuangan dan jasa Indonesia masih belum mencapai potensi optimal dengan inklusi finansial yang juga masih rendah. Modal dan dana adalah darah bagi perekonomian sehingga kondisi dengan hanya 49% penduduk dewasa Indonesia mempunyai tabungan di bank menyebabkan Indonesia memiliki biaya model yang lebih tinggi dari negara besar Asean lainnya. Perlu berbagai usaha kreatif dan sistematis sehingga sektor ini makin kuat dan membawa manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia tidak hanya di masa pandemi tapi juga setelahnya.

Kulster ketujuh yang *last but not least* memfokuskan pada “Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup.” Sektor pertanian dan kelautan masih mejadi lapangan kerja mayoritas penduduk Indonesia. Selama manusia masih membutuhkan makanan maka sektor ini tetap akan penting. Indonesia termasuk negara yang akan terdampak besar pada perubahan iklim dan kenaikan air laut sehingga perlu disiapkan dari sekarang adaptasi dan mitigasi-nya. Indonesia tahun 2045 tidak akan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan jika pada pada masa itu mayoritas hutan telah gundul, *coral reef* rusak dan tidak didiami ikan lagi, *biodiversity* hilang dan polusi tak terkendali. Editor

secara khusus mengundang Rektor IPB dan beberapa Guru Besar Pertanian untuk melengkapi analisa dan pemikiran para ekonom di kluster ini.

Telah banyak tenaga dan waktu dicurahkan oleh lebih dari seratus orang dengan keahlian beragam untuk menghadirkan buku ini ke hadapan pembaca. Semoga tidak hanya menghiasi ruang perpustakaan dan pajangan di kantor tapi juga menjadi referensi dan mewarnai kebijakan pemerintah, analisa akademis dan perbincangan publik di masa mendatang

Berly Martawardaya & Esther Sri Astuti

Editor

Daftar Isi

Sekapur Sirih	iii
Daftar Isi	ix
Cluster 1 Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia	1
1.1. Setelah Indonesia Naik ke Kelompok Pendapatan Menengah Atas <i>Andrinof A. Chaniago</i>	2
1.2. Sejahtera Sebelum Tua: Menujum Ekonomi Indonesia di Masa Depan <i>Alief Aulia Rezza</i>	7
1.3. Negara Berpendapatan Menengah-Atas, Mengapa Baru Sekarang? <i>Akhmad Rizal Shidiq</i>	15
1.4. Transformasi Ekonomi Indonesia Paska Pandemi: Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan <i>Berly Martawardaya</i>	20
1.5. Arah Perekonomian Indonesia 2045: Menghindari “Jebakan Negara Berpendapatan Menengah” <i>Didin S. Damanhuri</i>	25
1.6. Mengurai Dasar Pertimbangan Transformasi Struktural: Mana yang Kita Pilih? <i>Edi Prio Pambudi</i>	30
1.7. Transformasi Struktural, Pengembangan <i>Bio-Industry</i> dan Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan <i>Hermanto Siregar</i>	36
1.8. Transformasi Ekonomi Indonesia: Survei Perkembangan Terkini <i>Mudrajad Kuncoro</i>	43
1.9. Bermimpi Ekonomi Indonesia Kuat Tahun 2030 <i>Muliadi Widjaja</i>	73
1.10. Pandemi dan Transformasi Ekonomi <i>A. Prasetyantoko</i>	78
1.11. Filantropi Islam dan Tranformasi Ekonomi Indonesia <i>Rahmatina A. Kasri</i>	86

Cluster 2	Sumberdaya Manusia, Tenaga Kerja, Kemiskinan,dan Jaminan Sosial	95
2.1.	Intervensi Promosi Kesehatan Melalui Perubahan Pola Hidup <i>Achmad Kautsar</i>	96
2.2.	Pandemi Multirupa: Bagaimana Mengatasi Isu Kesehatan, Ekonomi, dan Pertarungan Ide? <i>Ahmad Fuady</i>	103
2.3.	Peran Perguruan Tinggi dalam Menjawab <i>Digital Talent Gap</i> <i>Dana S. Saroso</i>	109
2.4.	Angkatan Kerja di Indonesia: Jalan Panjang Menuju Kelas Menengah <i>Devanto Shasta Pratomo</i>	117
2.5.	Pandemi COVID-19 dan Pertumbuhan Ekonomi: Apa Legasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo? <i>Dradjad H. Wibowo</i>	125
2.6.	Relevansi Gotong-Royong di Masa Pandemi <i>Evi Noor Afifah</i>	135
2.7.	Upaya Penanganan Dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi <i>Elan Satriawan</i>	142
2.8.	Risiko di Depan Kita: Menghadapi Potensi Perangkap Perlombaan ke Bawah <i>Fakhrul Fulvian</i>	148
2.9.	Covid-19 dan Kemungkinan Krisis Ekonomi <i>Lukman Hakim</i>	154
2.10.	Transformasi Perlindungan Sosial Guna Melindungi <i>Scooter Class</i> <i>Martin Daniel Siyaranamual</i>	159
2.11.	Kemiskinan dan Kesenjangan di Provinsi Papua <i>Mesak Iek</i>	170
2.12.	Perubahan Struktur Ekonomi dan Komposisi Tenaga Kerja di Indonesia <i>Muhammad Amir Arham</i>	175
2.13.	Sektor Pendidikan dan Pandemi dalam Perspektif Ekonomika Keperilakuan <i>Muhammad Ryan Sanjaya</i>	187
2.14.	Indonesia 2020: Mewujudkan Rakyat Sehat dan Produktif <i>Ninasapti Triaswati</i>	196

2.15.	Ketika Nature Bergerak; Relevansi Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Rimawan Pradiptyo</i>	203
2.16.	Membenahi Data Perlindungan Sosial <i>Sonny Harry B Harmadi</i>	216
2.17.	Membangun Sumberdaya Manusia dengan Sistem Perlindungan Sosial <i>Sudarno Sumarto</i>	222
2.18.	Strategi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Suharnomo</i>	231
2.19.	Teknologi Digital, Otomatisasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia <i>Teguh Yudo Wicaksono</i>	239
2.20.	Indonesia Perlu Meneruskan Investasi pada "Bonus" Demografi Lainnya <i>Turro Wongkuren</i>	251
Cluster 3	Energi, Perhubungan, Perumahan dan Infrastruktur	257
3.1.	Makan Bubur Panas di Tengah Pandemi <i>Arie Fitria</i>	258
3.2.	Membedah Sektor Pelayaran, Membedah Tren ke Depan <i>Ibrahim Kholilul Rohman</i>	269
3.3.	Batalan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara! <i>Marwan Batubara</i>	281
3.4.	Indonesia: Diplomasi <i>Hydrocarbon</i> dan Potensi Biomasa <i>Nuki Agya Utama</i>	287
3.5.	Energi Terbarukan Solusi Membangun Kemandirian <i>Maxensius Tri Sambodo</i>	295
3.6.	Teknologi Digital dan Pembangunan Ekonomi Kawasan 3T <i>Tirta Nugraha Mursitama</i>	306
3.7.	Peran Besar Santri dalam Pengembangan Sektor Perumahan <i>Winang Budoyo</i>	312

Cluster 4	Public Finance, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, dan Institusi	319
4.1.	Desa dan Taman Keadilan <i>Ahmad Erani Yustika</i>	320
4.2.	Indonesia Sudah Menjadi Masyarakat Urban, Tapi Kota-kota Kita Belum Siap <i>Ari Perdana</i>	325
4.3.	Utang Pemerintah Makin Membebani Perekonomian <i>Awalil Rizky</i>	332
4.4.	Dana Desa: Implikasi Membangun dari Pinggiran <i>Candra Fajri Ananda</i>	341
4.5.	Dukungan Sektor Pajak bagi Transformasi dan Penguatan Ekonomi Indonesia <i>Darussalam</i>	354
4.6.	Ekonomi Politik Kebijakan Covid-19 <i>Didik J. Rachbini & Omar Abdillah</i>	363
4.7.	Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Wilayah <i>Eddy Suratman</i>	373
4.8.	Keluar dari Zona Merah Pertumbuhan Ekonomi <i>Eko Listiyanto</i>	379
4.9.	Covid-19 dan Digitalisasi Ekonomi dan Momentum Transformasi Kebijakan Publik di Indonesia <i>Fajri Muharja</i>	383
4.10.	Korupsi dan Perekonomian <i>Firmanzah</i>	392
4.11.	Tantangan Kebijakan Fiskal Tahun 2021 <i>Handi Risza</i>	400
4.12.	Peran Otoritas Menghadapi Wabah Covid-19 <i>Marsuki</i>	408
4.13.	Kebijakan Fiskal Menghadapi Pandemi <i>Masyita Crystallin</i>	412
4.14.	Covid-19 dan Kesadaran Pembangunan yang Inklusif <i>Nunung Nuryartono</i>	423
4.15.	Governanza dan Pembangunan Berkelanjutan <i>Pitri Yandri dan D. S. Priyarsono</i>	427

4.16.	Prediksi Dampak Reformasi Regulasi terhadap Perekonomian Indonesia : Perspektif Literatur dan Empiris <i>Telisa Aulia Falianty</i>	434
4.17.	Komunikasi Kebijakan Pemerintah di Era Desentralisasi dan Pelajaran yang Dapat Diambil Pada Saat Pandemi <i>Yogi Vidyattama</i>	439
4.18.	Modal Sosial, Rekognisi dan Transformasi Menuju Kemandirian Ekonomi Desa <i>Wildan Syafitri</i>	445
4.19.	Wajah Kondisi Fiskal Pasca Pandemi <i>Yustinus Prastowo</i>	456
Cluster 5	Industri, Perdagangan, Daya Saing, UKM & BUMN	465
5.1.	Dari Deindustrialisasi Prematur ke Fleksibilitas Manufaktur: Adakah Peluangnya? <i>Aloysius Gunadi Brata</i>	466
5.2.	Digital Ekonomi Sirkular RT/RW Tukar Barang untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melawan Pandemi Covid-19 <i>Ardian Nengkoda</i>	472
5.3.	Memaknai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada Keberlanjutan Bisnis UMKM <i>Dina Nurul Fitria</i>	477
5.4.	Belt and Road Initiative: Akankah Indonesia Menerima Manfaatnya? <i>Eka Puspitawati</i>	483
5.5.	Memajukan UMKM <i>Faisal Basri</i>	490
5.6.	Mengungkit Ekonomi Melalui Industrialisasi <i>Fithra Faisal Hastiadi</i>	493
5.7.	Menjaga Persaingan Usaha dalam industri <i>e-commerce</i> <i>Guntur Saragih</i>	500
5.8.	Membangun Kawasan Perdesaan Dengan Model Ekonomi Sirkular Berbasis Keamanan Pangan dan Kemandirian Energi <i>Ichsan</i>	510

5.9. Zakat dan Wakaf untuk Penguatan Usaha Mikro <i>Irfan Syauqi Beik</i>	520
5.10. Transformasi Teknologi Sektor Manufaktur untuk Menangkal Deindustrialisasi <i>Josua Pardede</i>	527
5.11. Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya di Era Penerapan Bisnis Digital dan <i>E-Commerce</i> <i>Kodrat Wibowo</i>	529
5.12. Soliditas Lembaga dalam Mendukung Penguatan Industrialisasi <i>Mohamad Ajie Maulendra</i>	537
5.13. Liberalisasi dan peran Indonesia di WTO <i>Moch Faisal Karim</i>	544
5.14. Badan Usaha Milik Desa: Membangun Masa Depan Perekonomian Indonesia dari Desa <i>Mohamad D. Revindo dan Sean Hambali</i>	551
5.15. Langkah Lanjut Pemberdayaan UMKM Paska Pandemi <i>Muliaman D. Hadad</i>	567
5.16. Literasi Keuangan Generasi Milenial: Urgensi dan Tuntutan Zaman <i>Prima Naomi</i>	578
5.17. Parawisata dan Ekonomi Kreatif: Percepatan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pesisir Berbasis Kekayaan Sumber Daya Alam dan Wisata Kuliner sebagai Leading Sektor di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang <i>Ramli</i>	587
5.18. Tata Kelola Perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Permasalahan dan Tantangan ke Depan <i>Ratna Wardhani</i>	595
5.19. Strategi Kebangkitan Sektor Produktif Menuju Normal Baru <i>Rina Indiasuti</i>	629
5.20. Pandemi Covid-19 Percepat Transformasi Ekonomi Digital <i>Sri Adiningsih</i>	635

5.21.	Kebijakan dan Strategi Penguatan BUMN ke Depan <i>Sunarsip</i>	645
5.22.	Pandemi, Penciptaan Nilai Publik dan Kontrak Sosial Perusahaan <i>Ubaidillah Nugraha</i>	652
5.23.	<i>Servicification</i> pada Sektor Manufaktur: Penghela Ekonomi Indonesia <i>Widyastutik</i>	660
Cluster 6	Moneter, Keuangan, Pasar Modal, dan Sektor Jasa	665
61.	Cetak Uang: Solusi atau Mubazir <i>Anton Hendranata</i>	666
6.2.	Sigap Menjaga Sektor Perbankan <i>Aviliani</i>	673
6.3.	Mencari Solusi <i>Financing Gap</i> di Indonesia <i>Dian Ayu Yustina</i>	677
6.4.	Perbankan Era 4.0: Potensi, Risiko dan Tantangan Transformasi <i>Moch. Doddy Ariefianto</i>	683
6.5.	Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia <i>Ernie Tisnawati Sule</i>	687
6.6.	Kestabilan Konsumsi Rumah Tangga untuk Mempertahankan Apresiasi Nilai Tukar Rupiah <i>Eugenia Mardanugraha</i>	697
6.7.	Covid-19, <i>Universal Basic Income</i> dan <i>Modern Monetary Theory</i> <i>M. Fadhil Hasan</i>	702
6.8.	Arah Perbankan Digital Indonesia; Peluang dan Tantangan <i>Mohamad Adam</i>	706
6.9.	Menjaga Perbankan di Tengah Pandemi <i>Piter Abdullah Redjalam</i>	713
6.10.	Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia untuk Menangani Covid-19: Peluang dan Tantangan di Jangka Menengah-Panjang <i>Puspa Delima Amri dan Yudistira Slamet</i>	717
6.11.	Bank Sentral yang Merdeka <i>Putera Satria Sambijantoro</i>	731

6.12. Meningkatkan Akses Masyarakat ke Layanan Jasa Keuangan <i>Rudi Purwono</i>	736
6.13. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Perbankan Mengatasi Kejutan Eksternal <i>Umar Juoro</i>	743
Cluster 7 Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup	749
7.1. Ekonomi Sawit Indonesia di Tengah Isu Keberlanjutan <i>Achmad Adhitya</i>	750
7.2. Ekonomi Berkelanjutan dalam Persimpangan <i>Achmad Deni Daruri</i>	754
7.3. Tantangan Pangan Indonesia ditengah Pandemi Covid-19 <i>Arif Satria dan Alfian Helmi</i>	759
7.4. Ekonomi Kepulauan yang Inklusif: Manusia, Laut, dan Pulau <i>Athor Subroto</i>	767
7.5. Tiga Tantangan Agribisnis dan Kepakan Sayap Kupu-kupu SDG <i>Bayu Krisnamurthi</i>	774
7.6. Krisis Pangan 2020: Anatomi, Transmisi, dan Antisipasi <i>Bustanul Arifin</i>	779
7.7. Reforma Agraria Kehutanan: Ihtiar Meretas Jalan Kedaulatan Bangsa <i>Endriatmo Soetarto dan Eko Cahyono</i>	788
7.8. Menggapai Mimpi Swasembada Gula <i>Esther Sri Astuti S.A.</i>	800
7.9. Mengubah Strategi Program Ketahanan Pangan di Masa Pandemi <i>Harryadin Mahardika</i>	805
7.10. Merevitalisasi Kearifan Lokal untuk Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam <i>Mansur Afifi</i>	814

7.11. UU Cipta Kerja dan Transformasi Kebijakan Pangan Pasca Pandemi Covid <i>Muhammad Firdaus</i>	824
7.12. Transformasi Pasar Produk Pertanian di Indonesia: <i>From Conventional Wet Market to Digital Market Sahara</i>	831
7.13. Tranformasi Ekonomi dan Kutukan Sumber Daya Alam <i>Tata Mustasya</i>	842

6.12.

Meningkatkan Akses Masyarakat ke Layanan Jasa Keuangan

Rudi Purwono



Rudi Purwono adalah Dosen dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dia menyelesaikan S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Airlangga, Master dan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Saat ini, ia juga menjadi Komisaris Independen di Bank Jatim serta menjadi Wakil Ketua ISEI Cabang Surabaya. Selain itu, dia juga adalah salah satu pendiri Indonesia Bureau of Economic Research (IBER). Posisi penting lainnya yang pernah diduduki adalah anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan (Ekonom Regional) pada Tahun 2012-2018, Wakil Ketua II pada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur (2012-2016), Regional Chief Economist (RCE) pada Bank Negara Indonesia (BNI) WSY (Jawa Timur) tahun 2011-2015, dan anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur (2014-2016).

Urgensi Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan yang aman dan produktif. Yoshino dan Morgan (2017) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan jasa keuangan. Sementara itu, Asian Development Bank (2015) mendefinisikannya sebagai akses siap pakai untuk rumah tangga dan perusahaan ke layanan keuangan dengan harga terjangkau. Keuangan inklusif yang lebih besar dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan batas termiskin (Beck, Demirguc-Kunt & Levine, 2007). Hal ini juga dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan dengan

meningkatkan keragaman aset bank, sehingga dapat mengurangi risiko serta meningkatkan pendanaan yang stabil dari tabungan (Khan, 2011; Morgan & Pontines, 2014). Akses keuangan yang lebih besar juga dapat membantu Pemerintah beralih dari subsidi yang boros ke program transfer tunai, dan transparansi yang lebih besar terkait dengan transfer dana elektronik yang dapat membantu mengurangi korupsi. Mengingat pentingnya keterjangkauan akses keuangan tersebut, pasca krisis global tahun 2008 peran keuangan inklusif menjadi perhatian tersendiri. Tindak lanjut dari hal tersebut tampak pada tahun 2010 ketika pemimpin dari kelompok negara G-20 menyetujui rencana tindakan keuangan inklusif dan membentuk kemitraan global untuk keuangan inklusif dengan mempromosikan akses keuangan.

Lebih jauh, mengenai urgensi keuangan inklusif, suatu keadaan sosial yang menyebabkan masyarakat tidak dapat meraih manfaat dari sektor keuangan merupakan lawan kata dari keuangan inklusif, disebut juga dengan *financial exclusion* (Levshon & Thrift, 1995). Kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan dapat merugikan masyarakat miskin dalam usahanya mengenal produk-produk keuangan. Kembali kepada keuangan inklusif, gambaran antitesis tersebut memberikan penekanan terhadap pentingnya memastikan akses ke produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan (Chakraborty, 2011). Kelompok rentan yang dimaksud yakni kelompok yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah. Jalur-jalur pemenuhan kebutuhan keuangan inklusif menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan aksesibilitas serta media implementasi kebijakan Pemerintah.

Aksesibilitas Masyarakat terhadap Produk Keuangan

Faktor utama keuangan inklusif adalah aksesibilitas layanan keuangan, yang memiliki banyak dimensi seperti pembayaran dan rekening tabungan hingga kredit, asuransi, pensiun, serta pasar sekuritas. Sedangkan dimensi penting lainnya adalah penggunaan aktual produk dan layanan, seperti promosi untuk meningkatkan jumlah rekening bank. Hal itu akan dinilai gagal jika rekening tersebut jarang atau tidak pernah digunakan. Indonesia, dibandingkan dengan *peer*-nya di ASEAN, masih tergolong cukup rendah dalam kepemilikan rekening (atau *account*) di perbankan. The Global Findex Database tahun 2017 menyebutkan bahwa dari sebanyak 1.000 orang yang disurvei, terdapat 49% yang memiliki rekening perbankan. Indikator tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan Malaysia (85%) dan Thailand (82%), serta juga masih di bawah rata-rata dunia (69%). Jika melihat struktur geografis Indonesia yang kepulauan, Indonesia masih

lebih besar jika dibandingkan dengan Filipina sebesar 34% (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess, 2018).

Indikator mengenai utilisasi produk *financial intermediary*, selain kepemilikan tabungan juga dapat dilihat dari pemanfaatan fasilitas kredit. Utilisasi fasilitas tabungan dan kredit oleh masyarakat Indonesia, jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggalnya (*rural* atau *urban*) berdasarkan data Susenas, pada tahun 2018 sebesar 40,2% rumah tangga yang tinggal di perkotaan tidak memiliki rekening dan kredit pada perbankan (Badan Pusat Statistik, 2018a). Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017, dengan peningkatan sebesar 7,29% (pada tahun 2017 sebesar 32,91%) (Badan Pusat Statistik, 2017). Sementara itu, di kawasan perdesaan jumlahnya lebih besar dibandingkan di perkotaan, yakni 59,16% rumah tangga di perdesaan tidak memiliki rekening dan kredit pada perbankan. Jumlah tersebut juga meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 57,21% (meningkat sebesar 1,95%).

Untuk menunjukkan capaian dari keuangan inklusif, OJK menyusun survei Indeks Keuangan Inklusif dan Indeks Literasi Keuangan. Parameter pengukuran dari Indeks Keuangan Inklusif adalah penggunaan produk perbankan, melalui survei pada 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota dan kabupaten. Berdasarkan data OJK tersebut, pada tahun 2019 Indeks Keuangan Inklusif Nasional mencapai 76,19%, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 67,8%. Berdasarkan tempat tinggal, Indeks Keuangan Inklusif Nasional di kawasan kota (*urban*) sebesar 83,6%, sementara di kawasan desa (*rural*) sebesar 68,49% di tahun 2019. Indeks Literasi Keuangan juga menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2019 sebesar 38,03%. Naik dari tahun 2016 sebesar 29,6%. Tahun 2019, untuk kawasan kota, Indeks Literasi Keuangan sebesar 41,41% dan kawasan desa sebesar 34,53% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Faktor penting lainnya terkait keuangan inklusif adalah ketersediaan dan kesiapan infrastruktur keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat yang tinggal di desa, pemenuhan infrastruktur lembaga keuangan menjadi krusial, mengingat kondisi geografis, yakni jauhnya lokasi bank dengan rumah warga serta terbatasnya teknologi informasi dan komunikasi, menjadi kendala utama. Berdasarkan data Potensi Desa Tahun 2018, rata-rata jarak terdekat dari desa ke bank umum milik Pemerintah adalah 13,53 km, sementara ke bank umum milik swasta sejauh 20,89 km dan bank perkreditan rakyat sejauh 18,37 km (Badan Pusat Statistik, 2018b).

Keuangan Inklusif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Apabila melihat kepemilikan rekening dan kredit berdasarkan status kemiskinan, jumlah masyarakat miskin yang tidak memiliki

kedua fasilitas tersebut masih sangat tinggi hingga lebih dari 70%. Data Susenas Tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat miskin (40% ke bawah) yang tidak memiliki rekening dan kredit yakni sebesar 74,78% (Badan Pusat Statistik, 2018a). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 73,15% (Badan Pusat Statistik, 2017). Sementara itu, tahun 2018 pada masyarakat kaya (pendapatan 60% ke atas) sekitar 46,51% tidak memiliki rekening dan kredit. Jumlah tersebut meningkat 4,97% dibandingkan dengan tahun 2017 (sebesar 41,54%). Berdasarkan pendapatan, terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang tidak memiliki rekening dan kredit, meskipun juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas.

Keuangan inklusif berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan stabilitas keuangan dalam lanskap pembangunan ekonomi suatu negara. Asumsinya bahwa peningkatan akses ke keuangan dan penggunaan layanan keuangan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yoshino & Morgan, 2017). Namun dalam prosesnya, masalah utama terdapat pada informasi asimetris antara penyedia (dari bank), dan permintaan (terutama dari kelompok miskin) yakni mengenai kurangnya informasi tentang keuangan inklusif. Di mulai sejak tahun 2010, Pemerintah dan otoritas moneter saat itu banyak melakukan diskusi mengenai *financial inclusion* dan strateginya dengan fokus pada bagaimana menyediakan akses perbankan dan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat (Hadad, 2010). Dalam perkembangannya, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi, yang membentuk Dewan Nasional dalam implementasi dan monitoring serta evaluasi di tingkat pelaksanaan. Peraturan Presiden tersebut juga sebagai kerangka koordinasi antarlembaga, Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK pun telah memiliki *Master Plan* Strategi Jasa Keuangan Inklusif. Sementara itu, untuk sistem pembayarannya, Bank Indonesia telah memiliki *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia dalam kerangka mewujudkan keuangan inklusif.

Mengapa masyarakat tidak memiliki rekening pada perbankan atau tidak mengakses jasa keuangan? Menurut The Global Findex Database tahun 2017, 72% (dari masyarakat yang tidak memiliki rekening) menyatakan karena tidak memiliki dana yang cukup untuk membuka tabungan. Ini menjadi alasan terbesar mengapa tidak memiliki rekening dalam perbankan. Sekitar 33% dari masyarakat yang tidak memiliki rekening yang disurvei menyatakan bahwa jarak antara rumah dengan bank terlalu jauh; sekitar 32% menyatakan jasa keuangan (memiliki rekening) terlalu mahal bagi mereka (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess, 2018). Meskipun berbeda survei dan metodologi dengan data Susenas yang digunakan untuk analisis

sebelumnya, survei dari World Bank ini dapat memberikan gambaran mengapa masyarakat tidak mengakses jasa keuangan.

Arah ke Depan

Layanan jasa keuangan merupakan salah satu keputusan yang dilakukan oleh individu ketika harus memilihnya dengan mempertimbangkan kebutuhan lainnya. Dalam sudut pandang konsumsi, jika individu mempertimbangkan layanan jasa keuangan kurang memberikan manfaat dibandingkan dengan kebutuhan lainnya, maka layanan jasa keuangan mungkin bukan kebutuhan yang dipilih. Akibatnya, individu tersebut memutuskan untuk tidak memiliki atau tidak mengkonsumsi jasa keuangan. Padahal, dalam sudut pandang secara makro, aksesibilitas masyarakat pada jasa keuangan sangat penting. Tetapi, dalam pandangan keputusan individu (di sisi mikro), hal tersebut mungkin dapat dikesampingkan oleh individu. Pertanyaannya kemudian, apakah individu tersebut memang tidak membutuhkan jasa keuangan untuk keberlanjutan aktivitas kehidupannya ke depan?

Keuangan inklusif dalam praktiknya memerlukan pandangan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang ada di masyarakat, seperti misalnya adanya ketidaklengkapan informasi manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin. Implementasi strategi keuangan inklusif sangat kompleks dan dalam jangka panjang melibatkan begitu banyak institusi, lintas instansi dalam Pemerintahan, baik keuangan dan non-keuangan juga dengan sektor swasta (Luna-Martinez, 2017).

Dalam The Findex Database 2017 disebutkan juga bahwa salah satu hambatan aksesibilitas masyarakat Indonesia pada layanan keuangan adalah jarak dengan bank (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess, 2018). Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dalam implementasi strategi keuangan inklusif. Karena sifat hambatan dari pelaksanaan di lapangan mungkin dapat bersifat *costly* dan kompleks sehingga memberatkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam strategi tersebut. Padahal peluang potensial saat ini juga tersedia. Kemajuan teknologi menjadikan bank bersifat *branchless* dengan pengawasan secara digital dan jangkauan lembaga keuangan ke konsumennya juga dapat dijangkau melalui digitalisasi, pun juga saat ini menjadikan kebijakan *sosial protection* untuk menggunakan teknologi digital (bukan *cash only*). Saat ini, Indonesia telah memiliki infrastruktur *branchless banking* dengan nama Laku Pandai, yang telah beroperasi dalam beberapa tahun dan berdasarkan data OJK terdapat agen Laku Pandai sekitar 1.146 juta agen per September 2019 di 514 Kabupaten/ Kota (<https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>).

Hal yang juga penting dalam implementasi strategi keuangan inklusif adalah pengembangan industri keuangan (lembaga intermediasi keuangan) di Indonesia. Aksesibilitas perbankan ini tidak hanya dibutuhkan oleh konsumen saja, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat akan dapat menyimpan uangnya secara aman dan dapat meningkatkan produktivitas usahanya dengan kredit. Tetapi perbankan juga memiliki peluang pasar yang sangat besar dari hal ini. Misalnya, dalam kredit untuk usaha mikro dan kecil dipandang sangat menjanjikan seiring dengan semakin dinamisnya perekonomian Indonesia. Resiko yang kecil karena pinjaman yang kecil dan pendek jangka waktunya, juga tingkat kepatuhan bayar pelaku usaha ini yang cukup tinggi, dapat menjadi peluang baik bagi bank.

Perencanaan strategi yang matang dalam mendukung implementasi keuangan perlu dilakukan secara komprehensif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah merancang produk atau layanan yang beragam, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengacu pada data Susenas tahun 2018, diketahui bahwa sekitar 33,79% masyarakat yang tinggal di perkotaan hanya memiliki rekening saja. Sementara itu, 40,2% individu di perkotaan tidak memiliki rekening dan kredit. Sekitar 27,71% masyarakat dengan pendapatan 60% ke atas hanya memiliki rekening, dan 11,46% memiliki hanya kredit saja (Badan Pusat Statistik, 2018a). Kelompok ini dapat menjadi target bagi perbankan untuk diversifikasi produk. Selain itu, bagi sektor perbankan, data potensi tersebut merupakan hal penting yang harus dimiliki dalam proses berinovasi. Memastikan bahwa upaya-upaya dalam mewujudkan keuangan inklusif selaras dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan titik-titik ekonomi baru di daerah, dan untuk hal tersebut sangat diperlukan koordinasi antara para pemangku kepentingan sektor keuangan dan non-keuangan, baik juga sektor swasta dan Pemerintahan (Gradstein, Randall & Adric, 2018). Investasi dalam hal data dan analisis potensi di sektor jasa keuangan juga sangat penting dalam implementasi strategi keuangan inklusif, karena memungkinkan strategi ini berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor suksesnya implementasi strategi keuangan inklusif adalah komunikasi yang efektif dan juga *branding* dari program-program aksi sehingga implementasi awal mendapat perhatian dari *stakeholder*.

Daftar Pustaka

- Asian Development Bank. 2012. *Technical Assistance for Improving Financial Inclusion in Asia and The Pacific*. Manila: ADB.
- . 2015. *Asian Development Outlook 2015: Financing Asia's Future Growth*. Manila: ADB.

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Susenas (Survei Sosial-Ekonomi Nasional) 2017*.
- . 2018a. *Susenas (Survei Sosial-Ekonomi Nasional) 2018*.
- . 2018b. *Potensi Desa 2018*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. 2007. "Finance, Inequality and The Poor". *Journal of Economic Growth*, 12(1).
- Chakraborty, K. C. 2011. *Financial Inclusion: A Road India Needs to Travel*. Speech. Mumbai: Reserve Bank of India.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. 2018. *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and The Fintech Revolution*. The World Bank.
- Gradstein, H. L., Randall, D., & Ardic Alper, O. P. 2018. *Developing and Operationalizing A National Financial Inclusion Strategy: Toolkit* (No. 127712). The World Bank.
- Hadad, M. D. 2010. "Developing A Financial Inclusion Strategy: The Case of Indonesia". *Presentation for the, 27-29 Global Partnership for Financial Inclusion*. Dalam <http://www.gpfi.org>.
- Khan, H. R. 2011. "Financial Inclusion and Financial Stability: Are They Two Sides of The Same Coin". *Address by Shri HR Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at BANCON*.
- Leyshon, A., & Thrift, N. 1995. "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United State". *JSTOR, New Series*, Vol.20, No.3.
- Luna-Martinez, D. 2017. *Financial Inclusion in Malaysia: Distilling Lessons for Other Countries* (No. 115155, pp. 1-68). The World Bank.
- Morgan, P., & Pontines, V. 2014. "Financial Stability and Financial Inclusion".
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Laporan Kinerja 2019*.
- . (n.d). Diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>.
- Yoshino, N., & Morgan, P. J. 2017. *Financial Inclusion, Regulation, and Education: Asian Perspectives*. Asian Development Bank Institute.